

# AKTUALISASI PANCASILA: DARI GLOKALISASI KE TINDAKAN KOLEKTIF

*Willfridus Demetrius Siga*

*Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bandung*

**ABSTRACT:** The millennial generation is considered having active characters and mastering technical and individual skills. This competence is often not balanced with the individual's ability to care about the problems of national ideology. The ideology in this matter is Pancasila which is still seen as a product of the past, intimidating, and even turned into techniques of mass degradation. First, the author raises the thoughts of George Ritzer and Roland Robertson who mentioned that the authenticity of globalization must be firmly grounded in globalization. Second, the writer uses Gabriel Marcel's perspective which offers a different approach to the millennial generation that lives in the digital revolution, that is, the presence as a collective action. The intended action is a social action in which individuals are willing to take part through their presence that involves feelings and openness to the issue of nationalism so that Pancasila can be experienced as an ideology that is rich in collective values and habitus.

**KEYWORDS:** *ideology, Pancasila, the millennial generation, techniques of mass degradation, globalization, glocalization, digital revolution, presence, collective action, nationalism, values, habitus.*

**ABSTRAK:** Generasi milenial dinilai memiliki karakter aktif, menguasai kemampuan teknis, dan individual. Kompetensi ini sering tidak diimbangi dengan kemampuan individu untuk peduli terhadap persoalan ideologi bangsa. Ideologi dalam hal ini adalah Pancasila yang masih dipandang sebagai produk masa lalu, intimidatif bahkan berubah menjadi teknik degradasi massa. Pertama, penulis mengangkat pemikiran George Ritzer dan Roland Robertson yang menyebut bahwa

otentisitas globalisasi harus kuat berpijak pada glocalisasi. Kedua, menggunakan perspektif Gabriel Marcel yang menawarkan sebuah pendekatan berbeda bagi generasi milenial yang hidup dalam revolusi digital yaitu kehadiran sebagai tindakan kolektif. Tindakan yang dimaksud adalah sebuah tindakan sosial di mana individu secara rela mengambil bagian melalui kehadiran yang melibatkan perasaan dan keterbukaan terhadap persoalan nasionalisme sehingga Pancasila dapat dialami sebagai ideologi yang kaya nilai dan habitus kolektif.

**KATA-KATA KUNCI:** *ideologi, Pancasila, generasi milenial, teknik degradasi massa, globalisasi, glocalisasi, revolusi digital, kehadiran, tindakan kolektif, nasionalisme, nilai, habitus.*

Globalisasi melemparkan kita ke tengah arus banalitas revolusi digital. Arus liar dan sulit terbendung inilah yang hari-hari ini mendominasi para penghuni peradaban milenial. Yasraf Amir Piliang menyebutnya dengan “dunia yang berlari”, sebuah revolusi digital yang mentransformasi secara revolusioner struktur informasi dan komunikasi masyarakat dengan kemajuan teknologi digital.<sup>1</sup> Menurut Borgman, teknologi modern berusaha membuat manusia mencapai otonomi dan kemakmuran dengan menyediakan mesin-mesin komoditas secara cepat, di mana saja, aman, efisien dan efektif. Faktanya, mesin-mesin ini dapat berubah secara radikal, sementara komoditas yang dihasilkannya tetap sama.<sup>2</sup> Industri-industri sosial dan ekonomi kini tengah mengalami perubahan secara elektronik. Mengutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, sampai tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-6 di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang dengan pengguna internet sebesar 123 juta

---

<sup>1</sup> Yasraf A. Piliang, *Dunia yang Berlari: Mencari Tuhan-tuhan Digital* (Jakarta: Grasindo, 2004), xii.

<sup>2</sup> Tim Redaksi Mizan, *Mendiagnosis Tubuh Komunitas Virtual dalam Balada Manusia dan Mesin: Episode yang Hilang di Panggung Teknologi* (Bandung: Mizan, 2002), 10-11.

orang.<sup>3</sup> Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dirilis bahwa sepanjang tahun 2017 dari populasi penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta orang lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet. Mayoritas penggunaannya adalah masyarakat perkotaan sebanyak 72,41% dengan pengguna terbanyak di Pulau Jawa sebesar 57,70%. Pemanfaatan internet pun bervariasi, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan moda transportasi, bisnis *online*, bekerja ala kantoran, bahkan menciptakan karya. Pengguna terbanyak di kalangan anak muda milenial usia 19-34 tahun yang nyaman dengan profesi baru seperti *selebgram*, *youtuber*, dan bisnis *startup*, entah sebagai pendiri atau konsumen.<sup>4</sup> Jean Baudrillard menyebutnya dengan istilah *hyper reality*.<sup>5</sup> Internet dianggap mampu mengambil alih realitas. Kondisi ini menggiring manusia ke dalam kondisi ketiadaan ego, ketiadaan identitas, ketiadaan teritorial, dan ketiadaan makna. Kondisi ini diperparah dengan arus informasi media yang tidak meninggalkan jejak makna apapun bagi peningkatan makna hidup manusia. Manusia hanyut ke dalam kegilaan tanda, kegilaan tren, kegilaan gaya hidup, kegilaan prestise, tanpa menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam tanda-tanda tersebut.

Mengamati fakta pengguna internet yang terus meningkat, kita juga tidak begitu saja menutup mata bahwa internet kerap digunakan sebagai alat propaganda dan ujaran kebencian yang meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong (hoax). Data menunjukkan bahwa para pelaku ujaran kebencian selalu ada dan mengancam, misalnya pada bulan Februari 2018 polisi menangkap 18 pelaku penyebar hoax. Isu hoax yang disebarkan secara

---

<sup>3</sup> <https://kominfo.go.id>, diakses 4 November 2018, pukul 19.30 WIB.

<sup>4</sup> <https://tekno.kompas.com>, diakses 5 November 2018, pukul 11.00 WIB.

<sup>5</sup> Bdk. Jean Baudrillard, *In the Shadow of the Silent Majorities* (Semiotext (e), 1983), 66.

digital itu pada umumnya berkaitan erat dengan agama, suku, politik, kebijakan pemerintah, ancaman terhadap ideologi, ekonomi, bisnis, bencana alam, kecelakaan, penculikan anak, menang lotre, dan isu-isu komunal yang dianggap mengancam kehidupan berbangsa. Giddens menyebut kedua sisi revolusi teknologi sebagai risiko bermata ganda dari globalisasi.<sup>6</sup> Indonesia adalah bagian dari arus gelombang peradaban ini. Eksistensi, identitas dan nilai hidup berbangsa dan bernegara dipertanyakan dengan luas dan kritis. Konteks ke-Indonesiaan kita dengan Pancasila sebagai bingkai *philosophische grondslag* perlu direvitalisasi dalam kerangka globalisasi yang ditandai oleh revolusi digital. Berdasarkan uraian fenomena, data, dan studi pustaka, penulis merumuskan kerangka besar isi tulisan ini dalam dua pertanyaan: pertama, apakah revolusi digital sungguh mencabut individu dari akar kesadaran manusiawinya yang lokal? Kedua, bagaimana generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital mampu menghidupi Pancasila sebagai nilai dan habitus kolektif?

### **Generasi Milenial: Era Baru *Open Society***

Sejarah mencatat bahwa gelombang ketiga peradaban (1970-2000 M) adalah masyarakat informasi atau dikenal dengan “peradaban mesin.” Gelombang ketiga ini disebut juga sebagai *knowledge age*, dengan digunakannya satelit telekomunikasi, kabel optik dalam jaringan internet, masyarakat mampu berkomunikasi secara *online*. Lahirlah era komunikasi dan informasi. Pola hidup yang kemudian berkembang pada era ini adalah *open society*. Masyarakat bersaing dan bekerja sama sesuai dengan sistem kompetisi dan korporasi yang ada.<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, ketika kita berbicara tentang manusia, sertamerta kita juga berbicara tentang cara manusia mengada dalam

---

<sup>6</sup> Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity* (California: Stanford University Press, 1991), 117-8.

<sup>7</sup> Yves Brunsvick dan Andre Danzin, *Lahirnya Sebuah Peradaban: Goncangan Globalisasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 15-6.

dunianya. Manusia tidak bisa menanggalkan kebudayaan dan memperbincangkannya sebagai objek yang terpisah dari dirinya. Manusia menciptakan kebudayaan, dan kebudayaan mempersonalisasikan pribadi manusia.

Manuel Castells mengidentifikasi abad ke-20 sebagai abad yang mendatangkan interval waktu yang langka, sebuah transformasi kultur materil.<sup>8</sup> Secara etimologis, globalisasi dipahami sebagai pengembangan bentuk-bentuk jejaring sosial yang menjangkau dunia global. Sementara pada taraf tujuan, globalisasi mengubah pemahaman tentang eksistensi manusia yang sering tidak utuh. Menurut Ritzer, globalisasi didefinisikan dengan istilah difusi seluruh dunia. Globalisasi sebagai *interconnectivity* yang mencapai tingkat tertinggi sebagaimana tampak pada *extensity*, *intensity*, dan *impact* yang ditimbulkan. Untuk mencapai tingkat yang sedemikian, dibutuhkan banyak syarat, antara lain teknologi dan teknik organisasi. Tetapi di samping itu, juga diperlukan keyakinan (ideologi).<sup>9</sup> Dunia kini dikendalikan oleh tiga "dewa" sakti yakni kapitalisme, postmodernisme dan ruang-ruang maya (*virtual space*) yang mengkonstruksi, mencetak, dan menentukan arah kehidupan global.<sup>10</sup>

Adam Smith melalui ideologi globalisme menyatakan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan dunia hanya dapat dicapai dengan perdagangan bebas yang dilakukan oleh pengusaha swasta, tanpa intervensi negara di bidang ekonomi. Orang-orang berhasil dibuat yakin bahwa "pasar bebas" dan "perdagangan bebas" dapat menghantar masyarakat kepada masa depan yang gemilang, masyarakat yang makmur.<sup>11</sup> Senada dengan pendapat Joe Arun, bahwa globalisasi adalah *a trendy term for an old process*. Globalisasi bukanlah soal perdagangan

---

<sup>8</sup> Tony Schirato dan Jen Webb, *Understanding Globalization* (London: Sage Publication, 2003), 46.

<sup>9</sup> George Ritzer, *The Globalization of Nothing* (USA: Pine Forge Press, 2004), 74-5.

<sup>10</sup> Yasraf Amir Piliang, *loc.cit.* (Jakarta: Grasindo, 2004), xvii.

<sup>11</sup> I. Wibowo, *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 9-20.

bebas saja, tetapi juga soal pandangan hidup yang meremehkan mereka yang lemah.<sup>12</sup> Perbedaan pandangan ini seolah membenarkan apa yang diramalkan oleh McLuhan tentang sebuah *global village* (desa global) di mana kebebasan dan kemajuan menjadi roh globalisasi.<sup>13</sup> Globalisasi membenamkan realitas pada suatu era *networking* sekejap. Janji-janji globalisasi mencakup kemudahan dan presisi dalam hidup, angka produksi yang lebih besar dan interaksi manusia yang *unlimited* yang diperankan oleh bentuk-bentuk komunikasi baru dan cepat. Ruang maya berubah menjadi “pasar”. Internet adalah “ruang imajiner” di mana setiap orang melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru, yaitu cara artifisial. Realitas maya menggantikan realitas riil yang penuh sentuhan emosional.

### **Persoalan Mendasar Generasi Milenial**

Setelah tumbang rezim Orde Baru, setiap individu dan kelompok, yang tadinya anonim, tanpa identitas, mendapat peluang untuk tampil. Akibatnya: *overacting*, saling terancam, dan makin jelas kenyataan bahwa individu Indonesia sebenarnya mentah, kosong dan naif. Kohesi kelompok menjadi rapuh. Identitas kolektif kebangsaan dan kesatuan kehilangan dasar. Berbagai gerakan separatis mengisyaratkan, bahwa nasionalisme Indonesia selama ini adalah suatu ikatan yang artifisial, bahkan manipulatif, sehingga karenanya rentan. Ironisnya, konsep “kesatuan” selama ini dipupuk justru melalui berbagai strategi konflik horisontal yang tak habis-habisnya. Akibatnya, kesatuan justru dialami sebagai traumatik, opresif dan eksploitatif. Dalam perspektif akademis global pun konsep tentang “identitas” dan “kedirian” (*self*) memang sedang berubah dan dirumuskan ulang. Singkatnya, komunitas artifisial miskin intimitas dan pengalaman personal.

---

<sup>12</sup> Sindhunata, “Dilema Globalisasi” dalam *Basis* No. 01-02, tahun ke-52 (Januari-Februari 2003), 5.

<sup>13</sup> Tony Schirato dan Jen Webb, *loc.cit.* (London: Sage Publication, 2003), 48.

Kaburnya identitas bangsa di atas berefek pada bergesernya gambaran tentang sistem (tatanan) dunia. Akibat intensitas interaksi dan komunikasi menjadi semu dan dangkal sehingga gambaran dunia pun menjadi jamak bergantung pada niat, tujuan, dan kepentingan. Kejamakan gambaran dunia itu kemudian muncul melalui respons agresif fundamentalisme dan radikalisme yang angkuh. Manusia merasa tak lagi mampu mengontrol hidup dan dunia ini. Individu dan kelompok menjadi tidak aman dan kosong. Imbasnya adalah agama yang tiba-tiba menjadi primadona peradaban: suatu lembaga yang diharapkan membawa pencerahan. Namun yang terjadi ternyata sebuah absurditas. Agama-agama hanya sebagai benteng identitas yang egosentris dan infantil, sering malah sebagai alat untuk memicu peperangan, atau kadang sebagai candu yang menenangkan tetapi berwujud seperti monster yang merusak. Sebagai institusi, agama cenderung mempertegas *in-group* dan *out-group* yang selalu memudahkan timbulnya pertentangan. Sebagai institusi, agama pun berkecenderungan kuat meraih kekuasaan, terutama bila sakralitas diperalat untuk meneguhkan kegalauan identitas, ditunggangi oleh ketamakan dan pengabaian rasa keadilan. Hakikat terdalam dari spiritualitas agama-agama tergantung dengan ilusi religius.<sup>14</sup> Totalitarisme agama menjadi konkret ketika kehidupan direduksi dalam satu wajah, mengedepankan satu aturan mutlak, satu kebijakan, satu pondasi ranah nilai luhur kehidupan, satu religiusitas, satu kulturalitas, satu agama. Singkat kata, totalitarianisme menedepak nilai-nilai pluralitas.

### **Teknik Degradasi Massa (*Techniques of Mass Degradation*)**

Metode ini diutarakan oleh Gabriel Marcel, seorang filsuf Prancis (1889-1973).<sup>15</sup> Marcel bergerak dari kehidupan nyata menuju ke tahap

---

<sup>14</sup> I. Bambang Sugiharto, "Humaniora untuk Masyarakat Transisi", Makalah Seminar, Strategi Pendidikan Humaniora untuk Masyarakat Transisi, STSI Bandung, 2 November 2002.

<sup>15</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: Gramedia, 2001), 58-80.

pemikiran dan selanjutnya turun lagi ke dalam lapangan kehidupan nyata. Marcel menghantar kita pada gejala-gejala dalam masyarakat modern yang mengancam keutuhan pribadi manusia dan kesatuannya dengan orang lain.<sup>16</sup> Krisis di dunia Barat secara khusus menggarisbawahi kondisi sosial dan institusional kontemporer yang lahir dari kedalaman keberadaan hidup manusia. Kebanyakan orang berpendapat bahwa krisis eksistensi berada pada level metafisikal dan sosial saja. Sedangkan, Marcel memandang krisis eksistensi berada pada level politik yang bisa dilihat sebagai sebuah bahaya yang membutuhkan kelembutan untuk dianalisis dalam kebebasan ber-“Ada” manusia yang terus berproses dalam sejarah yang memberi bentuk dan nama pada setiap peristiwa.<sup>17</sup> Oleh karena itu, jangan pernah melupakan sejarah.

Marcel mencoba merefleksikan teknik degradasi manusia kontemporer yang lebih diterima sebagai suatu bentuk pemisahan. Bagi Marcel, teknik-teknik yang merendahkan merupakan metode deliberasi yang bermaksud menyerang dan merusak pribadi manusia dan sedikit demi sedikit mentransformasi manusia sebagai produk gagal yang tidak hanya menyerang level intelektual tetapi sekaligus merasuk dalam jiwa. Manusia (subjek) didegradasi sampai pada level kebinatangan dan relasi hanya menjadi seperti racun yang mencemari hubungan antarpribadi di mana sahabat dan sesama menjadi musuh. Kita berada dalam bayangan sejarah yang diwarnai dengan dahsyatnya kejahatan kolektif, intimidatif, dan brutalitas seperti teror, propaganda, peperangan, pemerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Teknik-teknik yang merendahkan, dapat mendegradasi bahkan menghina disposisi kesadaran dan martabat kemanusiaan tanpa kita sadari kalau kita sedang didegradasi. Menurut Marcel, kita dapat meredam gejala ini hanya dengan memutuskan

---

<sup>16</sup> Gabriel Marcel, *The Mystery of Being, Vol. 1, Reflection and Mystery* (London, The Harvill Press, 1951), 15.

<sup>17</sup> *But this is just to say that in a very that sense history itself is also a way of forgetting, or, to put it more flatly, of losing that real contact with the event for the lack of which historical narrative so often reduces itself to a simple abstracting naming of events.* Gabriel Marcel, *Man Against Mass Society* (Indiana: Gateway Editions, 1952), 38.

lingkaran kekerasan dan menumbuhkan semangat solidaritas dan keberanian kelompok.

### **Nasionalisme: Pemulihan Identitas Negara-Bangsa**

Istilah nasionalisme cenderung disamakan dengan egoisme nasional (Johann Gottfried dan Augustin de Baruel). Namun istilah lain seperti "kebangsaan atau nasionalitas" (*nationality*) dan "kenasionalan" (*nationalness*) sebagai semangat nasional atau individualitas nasional lebih disukai. Secara umum nasionalisme sering didefinisikan sebagai suatu proses pembentukan dan pertumbuhan bangsa-bangsa, suatu sentimen atau kesadaran memiliki bangsa bersangkutan, bahasa dan simbolisme bangsa, dan sebagai suatu gerakan sosial dan politik.<sup>18</sup> Menurut Gellner, nasionalisme adalah prinsip politik yang menyatakan bahwa kesamaan budaya adalah ikatan sosial yang mendasar (legitimasi kesamaan budaya).<sup>19</sup> Nasionalisme berupaya mempertinggi derajat bangsa. Sasaran umum ini ada tiga: otonomi nasional, kesatuan nasional dan identitas nasional. Dari sini muncul definisi nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial. Kata "bangsa yang potensial" mencakup banyaknya situasi di mana suatu minoritas kecil kaum nasionalis yang mempunyai konsep umum tentang 'bangsa'.<sup>20</sup> Nasionalisme mengejar sasaran identitas nasional dalam tingkatan yang berbeda-beda, tetapi selalu kembali kepada idealisme bangsa itu sendiri. Singkatnya, nasionalisme merupakan teori legitimasi politik yang mensyaratkan bahwa batas-batas etnis tidak harus memotong ruang politik. Nasionalisme mengacu pada hubungan antara etnisitas dan negara.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Anthony D. Smith, *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah* (Jakarta: Erlangga, 2003), 6.

<sup>19</sup> Ernest Gellner, *Nationalism* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1997), 3.

<sup>20</sup> Anthony D. Smith, *op.cit.*, 11.

<sup>21</sup> Ernest Gellner, *op.cit.*, 99.

Bagaimana kita dapat menetapkan konsep bangsa? Benedict Anderson mengusulkan bangsa adalah sebuah komunitas politik yang dibayangkan - inheren dan berdaulat. Dengan 'membayangkan', bukan berarti 'diciptakan', artinya orang-orang yang mendefinisikan diri mereka sebagai anggota suatu bangsa namun dalam pola pikir kebersamaan.<sup>22</sup> Definisi mengenai bangsa (nasionalitas) adalah suatu komunitas yang (1) terbentuk dari keyakinan bersama dan komitmen yang saling menguntungkan, (2) mempunyai latar belakang sejarah, (3) berkarakter aktif, (4) berhubungan dengan suatu wilayah tertentu, dan (5) dibedakan dari komunitas lain melalui budaya publik yang khas. Oleh karena itu, bangsa didefinisikan sebagai "suatu komunitas manusia yang memiliki nama, yang menguasai suatu tanah air serta memiliki mitos-mitos dan sejarah bersama, budaya publik bersama, perekonomian tunggal dan hak serta kewajiban bersama bagi semua anggotanya". Sementara itu, konsep etnik dapat didefinisikan sebagai suatu komunitas manusia yang memiliki nama, yang berkaitan dengan satu tanah air, memiliki mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa unsur budaya bersama dan solidaritas tertentu, paling tidak di antara elit-elitnya.<sup>23</sup>

Nasionalisme merupakan suatu bentuk budaya dan agama. Fokus utama nasionalisme yakni "bangsa". Nasionalisme menuntut penemuan kembali dan pemulihan identitas budaya bangsa yang unik. Artinya, nasionalisme menuntut agar orang kembali pada akarnya yang otentik di dalam komunitas budaya historis yang menghuni tanah air leluhurnya. Bangsa kultural harus menjadi bangsa politik, dengan budaya publik yang menjadi pembentuk dan pengukur bagi masyarakat dan pemerintahannya. Karena itu, bangsa dicirikan oleh suatu "budaya politik", lengkap dengan peran politik dan institusinya yang khas serta

---

<sup>22</sup> Benedict Anderson dalam Thomas Hylland, *Ethnicity and Nationalisme* (London: Pluto Press, 1993), 99-100.

<sup>23</sup> Smith, *loc.cit.*, 15.

simbolnya yang unik, seperti bendera, lagu kebangsaan, festival, upacara dan simbol lain yang serupa.<sup>24</sup>

Bangsa adalah masyarakat di mana warga diharapkan berkomunikasi dan berintegrasi dalam hal budaya dan identitas diri secara abstrak dan anonim. Anderson menyebut karakter abstrak dari komunitas moral bangsa sebagai *the tomb of the unknown soldier*. Biasanya makam ini dibiarkan sengaja kosong, menandakan secara universal karakter bangsa yang abstrak. Namun suara makam adalah dari jenazah yang diidentifikasi sebagai jiwa abadi, mereka tetap jenuh dengan imajinasi tentang 'hantu' yang bernama nasional.<sup>25</sup> Ideologi bangsa digambarkan sebagai penggabungan dari ekonomi dan politik nasionalisme dan teknologi menjadi prasyarat untuk memfasilitasi standarisasi komunikasi dan pengetahuan. Anderson menekankan bahwa kapitalisme sebagai kondisi yang perlu bagi nasionalisme. Melalui penyebaran media informasi, orang memiliki akses tanpa perlu kontak langsung dengan originator. Permainan media (televisi, radio, surat kabar, *gadget*, internet, media sosial) telah menjadi bagian penting dalam standarisasi representasi dan bahasa.<sup>26</sup> Karena posisi kapitalisme sebagai kondisi yang perlu, maka di sisi lain kapitalisme yang ditandai dengan komoditas dan daya tarik konsumerisme melemahkan nasionalisme sebagai sebuah kesadaran kolektif. Ohmae maupun Friedman, keduanya berpendapat bahwa nasionalisme adalah penghambat dari kegiatan ekonomi yang kian mengglobal ini. Tidak mungkin atas nama nasionalisme membatasi keluar masuknya produk, atau keluar masuknya tenaga kerja atau keluar masuknya modal. Orang tidak memakai produk karena paham nasionalisme, begitu pula orang tidak mempekerjakan seseorang karena memandang sikap nasionalismenya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., 42.

<sup>25</sup> Benedict Anderson dalam Thomas Hylland, *loc.cit.*, 105.

<sup>26</sup> Ibid., 106.

<sup>27</sup> I. Wibowo, *loc.cit.*, 1-8.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, nasionalisme sebagai komunitas humanisme, bangsa Indonesia memiliki panorama peradaban yang sungguh dinamis yang lahir dari refleksi filosofis yang sungguh mendalam. Sejarah membuktikan bahwa rasa nasionalisme menyembul ketika cita rasa keadilan mengemuka, hati memberontak atas keterpurukan, penjajahan adalah sebuah keburukan, ketika ideologi yang bertolak belakang dengan spirit kebangsaan menjarah kearifan hidup sehari-hari. Nasionalisme di era Orde Baru tampak gemilang di luar, tetapi keropos di dalam. Nasionalisme kerap dimaknai sebagai aktivitas bela negara, dalam banyak praktek telah meminggirkan rasa humanisme dalam berbagai wajah. Komunitas yang terbentuk pada periode ini adalah komunitas “ambigu”. Komunitas ini memiliki dua makna sekaligus, bangsa kita memang berada dalam disposisi ambigu maksudnya terus bergumul dengan kerawanan diktatorial dan kekejaman otoritas di satu sisi, tetapi di sisi lain komunitas ini menampilkan keberanian-keberanian untuk tidak berhenti mengkritik kebobrokan.<sup>28</sup>

Kini di era milenial baru, wajah Indonesia terkadang masih ada dalam kegamangan, ketika globalisasi, multikulturalisme, pluralisme, postmodernisme campur baur membangun peradaban tata dunia baru, kita masih terseok-seok oleh aneka kepentingan primordial. Maka konsep nasionalisme kita saat ini harus lebih mengedepankan skema-skema pembentukan masyarakat kolaboratif (partisipatif) yang menjunjung tinggi keragaman dan tidak mereduksinya dalam keseragaman. Kita harus menjadi komunitas yang menampilkan wajah dinamis dalam upaya-upaya kolaborasi konkret, cerdas dan kreatif satu sama lain dan dengan siapa saja demi membangun keutuhan bangsa manusia yang disebut Indonesia.<sup>29</sup> Oleh karena itu, nasionalisme harus

---

<sup>28</sup> Armada Riyanto, Andreas Doweng Bolo, ed., *Mengalami Pancasila: Kisah Pancasila dari Ruang-Ruang Pembelajaran* (Bandung: UNPAR Press, 2016), 5-12.

<sup>29</sup> *Ibid.*

dipandang sebagai sebuah proyek yang terus-menerus perlu dikerjakan dan diberi dasar relevansi yang baru. Artinya setiap individu memiliki persamaan hak. Dengan demikian, nasionalisme perlu dipandang sebagai sebuah proyek yang diskursif yang melibatkan semua elemen nasional tanpa ada pengecualian. Sebagai suatu proyek bersama, diskursus nasionalisme selayaknya mempertimbangkan konteks yang berkembang di sekitarnya yaitu globalisasi yang ditandai oleh derasnya arus revolusi digital.

### **Pancasila sebagai Nilai dan Habitus Bersama**

Nilai adalah hakikat suatu hal, yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia demi peningkatan kualitas manusiawi atau pantas dicintai, dihormati, dikagumi, atau yang berguna untuk sesuatu tujuan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada dalam inti suatu hal dan tidak semua nilai itu sama tingginya. Misalnya: nilai-nilai kecerdasan budi, kehendak bebas, hati nurani dan persaudaraan menduduki tempat tertinggi. Dalam rangka pemikiran ini nilai-nilai kultural perlu diperhatikan selain nilai sosial, nilai kesusilaan dan nilai keagamaan. Ada pula nilai-nilai abadi, yang berlaku setiap saat, seperti kebebasan beragama, tak seorang pun boleh dipaksa untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan imannya. Tidak seorang pun boleh dihalangi berbuat selaras dengan imannya, entah secara publik, entah sendirian atau dengan sesama, dalam batas-batas tertentu. Nilai-nilai itu dapat saling berkaitan, membentuk suatu sistem. Dalam kesatuan sistem itu nilai-nilai dapat bawah-membawahi atau koheren satu dengan yang lain, mempengaruhi berbagai bidang hidup manusia. Nilai dapat dilihat dari sudut etik, sebagai arti dari objek, peristiwa dan proses-proses hidup manusia yang menyatakan kualitas manusia dan termanifestasi dalam sikap hidup manusia (*moral conduct*).

Habitus (*habit*) secara umum diterjemahkan sebagai kebiasaan, watak atau karakter yang merujuk pada keseluruhan keadaan dan cara bertindak terhadap suatu rangsangan. Habitus dimaknai sebagai “gugus

insting, baik pribadi maupun kolektif, yang membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau kelompok". Kata 'insting' yang dimaksud di sini adalah kemampuan bereaksi yang spontan terhadap suatu masalah, yang nyata dalam sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan yang dimaksud mengarah pada cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau kelompok. Sedangkan kata 'gugus' menunjukkan adanya kesatuan dari berbagai elemen pembentuknya dan saling terkait erat secara konsisten. Dengan kata lain, kata insting dan gugus sedang menyoal *the whole of character* yang membentuk setiap individu sebagai pribadi yang sarat dengan kapasitas spiritual, emosional dan inteligensi.<sup>30</sup>

Bagaimana korelasi antara nilai dan habitus dalam mengaktualisasikan Pancasila bagi generasi milenial? Pengalaman hidup keseharian menjadi ruang membangun kesadaran ber-Pancasila. Pengalaman manusia Indonesia itu sangat dalam dan kaya seperti nilai-nilai Pancasila yang kaya dan mendalam. Pancasila adalah falsafah emansipatoris manusia Indonesia dalam konteks kulturalitas dan religiusitas yang plural. Pancasila menjadi filsafat tata hidup bersama yang menginspirasi pembebasan dari segala bentuk fanatisme yang mengatasnamakan suku, agama, dan budaya tertentu. Ide ini relevan dengan pendapat Soekarno yang menyebut bahwa Pancasila bukan idealisme, bukan komunisme, bukan fasisme, bukan pula Islamisme atau Kristenisme atau segala "isme" yang berkaitan dengan agama apa pun maupun bukan agama (Soekarno dalam *Pandji Islam*, 1940). Pancasila menjadi argumentasi paling valid untuk mengkritik totalitarisme konkret ketika kehidupan direduksi dalam satu wajah, mengedepankan satu aturan mutlak, satu kebijakan, satu pondasi nilai luhur kehidupan, satu

---

<sup>30</sup> Willfridus Demetrius Siga, "Membangun Habitus yang Humanis" dalam *Sancaya: Percikan Gagasan Pendidikan Tinggi* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 139-40.

religiusitas, satu kulturalitas, satu agama. Singkat kata, totalitarianisme mendepak nilai-nilai pluralitas. Pancasila menghadirkan diri sebagai fusi dan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang telah ada selama berabad-abad, bahkan sebelum kedatangan agama-agama. Nilai-nilai luhur itu meliputi, kegotongroyongan, kekeluargaan, religiusitas, kesetiakawanan, dan kebersatuan.

### **Globalisasi sebagai Glokalisasi**

Nasionalisme dimulai dari gagasan mengenai suatu budaya global yang didasarkan pada komunikasi elektronik masal. Revolusi dan popularitas teknologi informasi telah menghancurkan daya tarik budaya terdahulu dan relevansi pemikiran non-ilmiah. Perekat dalam masyarakat modern dan industrial bukan lagi bahasa dan budaya tetapi teknologi informasi dan pengetahuan komputer. Dunia yang ditimbulkan oleh wacana teknis itu berada di sini dan saat ini, di mana pun dan di setiap tempat. Oleh karena itu, tidak ada lagi kebutuhan akan komunitas langsung, hanya ibarat partisipasi dalam satu kali gerakan permainan wayang. Artinya, kerangka teknologi informasi komputer dan realitas maya yang diciptakannya harus dibungkus dengan darah dan daging budaya yang telah ada, atau dengan kata lain, dengan motif dan unsur yang dipilih dari budaya dengan maknanya yang asli. Lalu bagaimana dengan Pancasila dalam konteks ke-Indonesia-an?

Roland Robertson menyebut bahwa globalisasi itu sekaligus lokalisasi. Hubungan ini mendorongnya untuk memunculkan istilah glokalisasi. Glokalisasi hendak menonjolkan bahwa dalam globalisasi, apa yang lokal itu bukan hanya penting tetapi juga mendapat arti baru. Di bidang kultur, pendapat ini menjadi kritik terhadap globalisasi kultural yang menganggap remeh bahwa di era globalisasi ini yang lokal telah dikalahkan dengan global, dan yang lokal dianggap tidak bernilai lagi.<sup>31</sup> Globalisasi seharusnya membuka peluang horison hidup menjadi

---

<sup>31</sup> Sindhunata, *loc.cit.*, 8.

lebih luas, globalisasi menjadi kesempatan untuk mengoreksi paham klasik tentang kultur yang tidak relevan lagi pada zaman ini. Kultur lokal hanya dapat dimengerti dan dianalisis, bila ia dipertalikan dengan mozaik kultur global termasuk kultur industri global. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bukan lagi orang ngotot dengan keotentikan yang lama, melainkan mau mencari keotentikan yang baru. Dengan menerima hal-hal baru, ke-Indonesia-an kita ditantang untuk bersaing sebagai bangsa yang memiliki investasi budaya lokal yang sangat kaya.

Senada dengan Robertson, menurut Ritzer, gerakan yang mengglobal harus kuat berpijak pada lokalitas masing-masing budaya, spirit dan kearifan lokal (*local wisdom*). Hal ini penting karena kemajuan tidak identik dengan homogenisasi simbol, yang membawa kita pada kemungkinan terjadinya imperialisme budaya. Masing-masing budaya dan bangsa harus terus menggali dan menghidupi spirit lokalnya. Karena spirit itu adalah *habitus* komunitas tersebut (meminjam istilah Pierre Bourdieu) dan hanya dengan penggalian spirit lokal yang intens dari semua komunitas, tantangan global bisa dilewati secara bermartabat. Dalam konteks penentuan pilihan, spirit dan budaya lokal harus menjadi patokan. Kerangka pandang dan spirit lokal harus tetap memungkinkan kelompok-kelompok itu berperan sebagai subjek dan agen perubahan.<sup>32</sup> Dalam konteks ideologi, Pancasila adalah rumusan spirit lokal ke-Indonesia-an yang kontekstual bagi generasi milenial antara lain menyinggung soal keadaban pribadi dan kelompok, mencintai kebenaran, dan hormat pada keragaman identitas yang mengharamkan kekerasan.

### **Kehadiran sebagai Tindakan Kolektif**

Teori tindakan kolektif merujuk pada aksi bersama sebagai suatu “tindakan”. Terdapat perbedaan tegas antara perilaku dan tindakan;

---

<sup>32</sup> George Ritzer, *The McDonaldization of Society* (Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2000), 174-9.

perilaku berkaitan dengan spontanitas naluriiah sedangkan tindakan menyangkut kesadaran manusiawi. Biasanya orang bertindak secara individual dalam kerangka sistem dan norma yang dipatuhi bersama bahkan bisa terjadi di luar institusi. Tindakan yang dilakukan bersama inilah yang kita kenal dengan “tindakan kolektif”.<sup>33</sup> Menurut Hannah Arendt, tindakan mencerminkan “ke-siapa-an dari seorang pribadi”, yaitu jati diri seorang pribadi yang mampu memulai sesuatu yang baru. Dengan demikian, tindakan menyangkut segi-segi seperti motif, tekad, dan pelaksanaan. Semua segi tindakan ini merupakan “aliran yang berkesinambungan, suatu arus atau alur”. Lalu apa itu “tindakan kolektif”? Berbicara tentang tindakan kolektif tidak terpisahkan dari tindakan sosial. Pertama, reaksi bersama dalam proses-proses sosial yang tertuju pada makna-makna tertentu. Kedua, bertindak bersama-sama, terkoordinasi dengan cara yang berbeda dan mengarahkan diri satu kepada yang lain. Ketiga, tindakan yang diciptakan untuk melawan tatanan yang dianggap tidak sesuai kebaikan bersama.

Revolusi digital menempatkan seseorang menjadi subjek yang berbeda karena perangkat yang menjadi perantara memasuki hubungan dengan pribadi seseorang. Aksi bukan semata milik manusia, bukan pula milik media teknologi, tetapi aksi itu milik asosiasi mediasi, persekutuan antara manusia dan benda yang mengalami proses pertukaran kompetensi, saling menawarkan peluang baru, tujuan baru, dan fungsi yang baru. Milenials memiliki garansi bahwa teknologi akan mengubah dunia menjadi lebih baik. Kondisi ini menggiring manusia ke dalam kondisi ketiadaan ego, ketiadaan identitas, ketiadaan teritorial, dan ketiadaan makna. Kondisi kegilaan ini semakin diperparah dengan

---

<sup>33</sup> Sejak zaman Yunani Kuno orang sudah mendefinisikan tindakan. Dalam Etika Nikomachea Aristoteles menjelaskan momen-momen tindakan sebagai berikut: Kebebasan untuk memilih, keterarahan ke suatu tujuan dan alasan-alasan yang rasional. Tetapi juga ada definisi lain yang membatasi pada gerak badan yang disebabkan secara materiil atau mental dan ada yang memperluas konsep ini dan memasukkan pikiran ke dalam tindakan. Bdk. F. Budi Hardiman, *Memahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma* (Jakarta: Kompas, 2005), 71.

arus informasi media yang tidak meninggalkan jejak makna apapun bagi peningkatan makna hidup manusia. Manusia hanyut ke dalam kegilaan tanda, kegilaan tren, kegilaan gaya hidup, kegilaan prestise, tanpa menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam tanda-tanda tersebut. Fakta ini, yang kemudian mau mengatakan bahwa tindakan kolektif saja tidak cukup. Sebuah tindakan butuh kehadiran nyata, bukan melalui asosiasi mediasi. Menurut Gabriel Marcel, berbicara soal kehadiran, tentunya tidak terlepas dari faktor tubuh: tubuh adalah tubuhku. Tubuh mengambil bagian dalam 'kehadiran' dalam arti 'mempunyai' yang memungkinkan kita untuk merasakan.<sup>34</sup> Marcel mengartikan 'merasakan' sebagai 'menerima'. Menerima inilah yang menuntut kita untuk membuka diri, memberi diri, ada kemauan untuk berbagi, mengambil bagian secara penuh; ibarat tuan rumah yang menerima setiap orang untuk masuk, mempunyai jiwa yang terbuka dan berbagi apa adanya. Di dalam gerakan batin seperti inilah, kita dapat melihat bahwa 'merasakan' bagi Marcel sama dengan menerima (sesama, tetangga, tamu dan orang lain yang adalah tamu) – dalam diriku yang juga adalah tubuhku sekaligus merupakan wilayah bagi eksistensi kehadiranku (*avoir*). Kehadiran, dalam arti ini, mengandung suatu bentuk rekonsiliasi.

"Ada" selalu berarti "Ada bersama" (*esse* ialah *co-esse*). Kata "Ada bersama" tentu saja mengacu pada kehadiran. Dan 'kehadiran' merupakan eksplorasi pernyataan tentang hubungan hubungan antara "aku" dengan sesama. Bagi Marcel, 'hadir' tidak berarti berada di tempat yang sama. Kata hadir tidak diukur dari ruang dan waktu dalam artian 'hadir' bagi mereka atau sebaliknya. Menurutnya, "hadir" atau hadir bagi sesama apabila keduanya saling mengarahkan dengan cara yang sama sekali lain ketika berhadapan dengan objek.<sup>35</sup> Maka kehadiran itu baru

---

<sup>34</sup> Frans S. Slytto, *Arti dan Prototipe Kehadiran Sesama Menurut Gabriel Marcel* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), 37.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 38.

bisa terjadi dalam 'perjumpaan' antara 'Aku' dan 'Engkau'. Relasi 'Aku-Engkau' tampak konkret dalam relasi relasi manusia dengan yang lain yang adalah sesama. Dengan begitu, orang lain hadir bagi saya bila ia lebih dari satu individu saja. Aku hadir bagi orang lain jika 'Aku' sungguh-sungguh mengadakan kontak dengan yang lain sebagai persona sehingga relasi 'Aku-Engkau' bergeser ke taraf yang lebih tinggi yaitu 'Kita'.

### **Penutup**

Generasi milenial adalah sebuah fakta sejarah. Kita tidak bisa menolak apalagi menghujat. Generasi yang terbawa arus globalisasi ini dituntut untuk sekaligus glocalisasi. Glocalisasi hendak menonjolkan bahwa dalam globalisasi, yang lokal itu bukan hanya penting tetapi juga mendapat arti baru. Globalisasi seharusnya membuka peluang horison hidup menjadi lebih luas, globalisasi menjadi kesempatan untuk mengoreksi paham klasik tentang kultur yang tidak relevan lagi pada zaman ini. Kultur lokal termasuk nasionalisme dan kearifan hanya dapat dimengerti dan dianalisis, bila dipertalikan dengan mozaik kultur global termasuk kultur industri global. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bukan lagi orang ngotot dengan keotentikan yang lama, melainkan mau mencari keotentikan yang baru. Dengan menerima hal-hal baru, manusia sekarang ditantang untuk memperoleh suatu dunia yang otentik bagi dirinya termasuk 'membaca' Pancasila dengan cara yang baru dan relevan. Bagi milenials, nasionalisme bukan lagi soal gerakan ideologi, tetapi hadir dan bertindak secara kolektif yang dengan membawa roh glocalisasi yang bermartabat. Generasi milenial mampu menciptakan kohesi dan loyalitas antara individu-individu yang berpartisipasi dalam sistem sosial dalam ruang virtual. Ini adalah bukti bahwa milenials tidak antisosial. Milenials juga tidak lupa dengan sejarah. Oleh karena itu, keutuhan dan kesinambungan antara sejarah, simbol, realitas, dan kehadiran menjadi jembatan yang menghubungkan rasa, imajinasi, dan karakter generasi milenial agar sadar akan panggilan

hidup berbangsa dan bernegara yang kita sebut 'nasionalisme'.